
DEMOKRASI DAN MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN POLITIK: TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PRAKTIK DEMOKRASI DI ERA REFORMASI

Zainul Djumadin¹

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nasional
Email: zainulunas@yahoo.co.id

(Submission 05-09-2022, Revisions 15-11-2022, Accepted 16-11-2022)

Abstract

The end of President Suharto's rule in 1998 marked the beginning of a new era in Indonesia's political history. After being controlled by the authoritarian regime of Suharto, a new phase known as reform began to emerge with democracy as its main idea. This era is also known as the initial phase of open democracy with expanded decentralization. However, in the current reform era, problems of democracy have re-emerged. This can be seen in almost every political event, both on a national and regional scale. This means that even though the faucet of democracy has been opened, in substance the democratic process has not been fully realized. In this study, descriptive research methods were used as an effort to describe and interpret democracy and problems of political development in the reform era, including situations and conditions with existing relationships, opinions that developed, consequences or effects that occurred and so on. From the results of the analysis, a simple conclusion can be drawn that the democratic political system in Indonesia has developed over time. However, what needs to be considered in the future is to realize a substantive democracy, where democracy does not provide space for every ruler to abuse power, both in the process of seizing power and in order to maintain power. This is also in line with political and democratic education for the people, so that there will be a much better acceleration of the democratization process.

Keywords: *reform; democracy; decentralization; elections; political development.*

Abstrak

Berakhirnya pemerintahan Presiden Suharto pada tahun 1998 menandai dimulainya era baru dalam sejarah politik di Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Suharto, fase baru yang dikenal dengan reformasi mulai tampil dengan demokrasi sebagai gagasan utamanya. Era ini dikenal juga sebagai fase awal dimulainya demokrasi yang terbuka dengan desentralisasi yang semakin diperluas. Namun di era reformasi sekarang ini, permasalahan-permasalahan demokrasi kembali muncul. Hal ini bisa dilihat di hampir setiap perhelatan politik, baik skala nasional maupun daerah. Artinya, meskipun keran demokrasi telah dibuka, namun secara substansi proses demokrasi belum dapat diwujudkan secara maksimal. Pada penelitian ini, metode penelitian deskriptif digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan tentang demokrasi dan masalah-masalah pembangunan politik di era reformasi, mencakup situasi dan kondisi dengan hubungan yang

ada, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan sebagainya. Dari hasil analisa, dapat diambil suatu kesimpulan sederhana bahwa sistem politik demokrasi di Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu. Namun hal yang perlu diperhatikan ke depan adalah mewujudkan demokrasi yang substansi, di mana demokrasi tidak memberikan ruang bagi setiap penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaan, baik dalam proses merebut kekuasaan maupun dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Hal tersebut juga berbanding searah dengan pendidikan politik dan demokrasi terhadap rakyat, sehingga akan terjadi percepatan proses demokratisasi yang jauh lebih baik.

Kata Kunci: reformasi; demokrasi; desentralisasi; pemilu; pembangunan politik.

PENDAHULUAN

Di era sekarang ini, konsep pembangunan politik adalah salah satu topik penting para negarawan dan sarjana politik, khususnya kajian tersebut difokuskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di negara-negara berkembang. Di samping itu, di akhir dasawarsa 80-an, dunia menyaksikan rentetan peristiwa politik yang dianggap para pengamat sebagai awal dari sebuah proses besar demokratisasi yang akan terjadi secara global. Runtuhnya tembok Berlin, keberhasilan gerakan solidaritas di Polandia, disusul dengan semakin gencarnya gerakan pro demokrasi di Hongaria, Cekoslovakia, dan tumbangannya rezim sosialis komunis di Yugoslavia, telah menawarkan instrumen akan meluasnya proses demokratisasi itu di belahan dunia lainnya.

Hampir 30 negara di Eropa, Asia, dan Amerika Latin telah memunculkan rezim demokrasi untuk menggantikan rezim otoriter. Misalnya, berakhirnya pemerintahan Jenderal Franco di Spanyol pada tahun 1975. Begitu pula dengan di Bolivia pada tahun 1982 dan Argentina pada tahun 1983, telah terjadi peralihan rezim militer ke rezim sipil melalui proses pemilihan umum. Gerakan ke arah demokratisasi juga terjadi di Asia. Pada tahun 1986 kekuasaan Markos sebagai rezim militer totaliter telah berakhir dan digantikan oleh pemerintahan sipil Corazon Aquino (Huntington, 1995).

Fenomena tersebut mengalir dengan deras bersama arus demokrasi. Hal ini terlihat bahwa strategi demokratisasi melalui penguatan kedaulatan masyarakat akhirnya mendapat tempat yang cukup penting dalam wacana politik setelah dianggap berhasil diterapkan di sejumlah negara. Perubahan politik pasca perang dingin di negara-negara berkembang acap dikaitkan dengan sistem politik otoriter. Sejak itu, sebagian negara berkembang lebih memilih sistem politik baru, yakni sistem demokrasi (Fukuyama, 1992).

Di awal abad ke-21 ini, demokrasi masih merupakan satu-satunya pilihan dalam masyarakat. Namun dalam perkembangannya demokrasi banyak bersinggungan dengan sistem-sistem lain yang tentunya mengancam keberadaan demokrasi. Munculnya komunisme dan fasisme yang menjelma sebagai sistem totaliter dan otoritarianisme. Hal ini sangatlah wajar, dikarenakan terdapat perubahan-perubahan besar dalam masyarakat. Oleh sebab itu, ajaran demokrasi harus perlu dirumuskan kembali, sehingga menjawab permasalahan-permasalahan

yang ada dalam masyarakat sebagai dampak dari perubahan-perubahan yang ada di dalamnya (Budiardjo, 1997).

Di negara-negara berkembang, praktek demokrasi mendapat tantangan yang cukup berarti, hal ini dikarenakan, negara-negara berkembang masih dihadapkan pada masalah-masalah pembangunan politik, termasuk juga yang telah dialami bangsa Indonesia. Runtuhnya Orde Baru dikatakan sebagai awal dari dimulainya sistem demokrasi secara teori dan praktis. Indonesia menyebut dirinya berada pada masa transisi demokrasi, masa di mana demokrasi secara substansial mulai diterapkan. Namun bangsa Indonesia masih dihadapkan pada masalah-masalah pembangunan politik, seperti keanekaragaman, masalah disintegrasi bangsa, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Berakhirnya pemerintahan Presiden Suharto pada tahun 1998 menandai dimulainya era baru dalam sejarah politik di Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Suharto, fase baru yang dikenal dengan reformasi mulai tampil dengan demokrasi sebagai gagasan utamanya. Era ini dikenal juga sebagai fase awal dimulainya demokrasi yang terbuka dengan desentralisasi yang semakin diperluas. Semangat reformasi yang saat itu diusung untuk menjatuhkan rezim Orde Baru telah menjadi pintu masuknya praktik demokrasi.

Layaknya semangat suatu era, maka pada kata “reformasi” ditekankan muatan nilai-nilai utama yang kemudian menjadi landasan dan harapan dalam proses bernegara dan bermasyarakat. Reformasi ini secara sederhana berarti perubahan pada struktur maupun pada aturan-main dalam bidang ekonomi dan politik. Secara teoritis, perubahan tersebut diupayakan agar tatanan negara dan masyarakat baru, bisa tumbuh menjadi lebih demokratis secara politik serta lebih rasional secara ekonomi.

METODE

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014). Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Pengertian lain tentang penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya (Sukmadinata 2006).

Pada penelitian ini, metode penelitian deskriptif digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan tentang demokrasi dan masalah-masalah pembangunan politik di era reformasi, mencakup situasi dan kondisi dengan

hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan sebagainya.

PEMBAHASAN

• **Sistem Politik di Indonesia : Indikasi Menuju Sistem yang Demokratis**

Menurut Afan Gaffar (1999), paling tidak ada lima syarat utama/pokok bagi suatu sistem politik yang dikatakan sebagai sistem politik yang demokratis. Syarat-syarat tersebut antara lain :

1. *Akuntabilitas.*

Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan akan dijalannya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti luas. Yaitu, perilaku anak dan istrinya, juga sanak keluarganya, terutama yang berkaitan dengan jabatannya. Dalam konteks ini, si pemegang jabatan harus bersedia menghadapi apa yang disebut sebagai "*public scrutiny*", terutama yang dilakukan oleh media massa yang ada.

2. *Rotasi kekuasaan.*

Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Biasanya, partai-partai politik yang menang pada suatu pemilu akan diberi kesempatan untuk membentuk eksekutif yang mengendalikan pemerintahan sampai pada pemilihan berikutnya. Dalam suatu negara yang tingkat demokrasinya masih rendah, rotasi kekuasaannya biasanya rendah pula. Bahkan, peluang untuk itu sangat terbatas. Kalaupun ada, hal itu hanya dilakukan dalam lingkungan yang terbatas di kalangan elit politik saja.

3. *Rekrutmen politik yang terbuka.*

Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam negara yang tidak demokratis, rekrutmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja.

4. *Pemilihan umum.*

Dalam suatu negara demokratis, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga

bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, termasuk di dalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.

5. *Menikmati hak-hak dasar.*

Dalam satu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of press*). Hak untuk menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menentukan preferensi politiknya tentang suatu masalah, terutama yang menyangkut dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, dia punya hak untuk ikut menentukan agenda apa yang diperlukan. Hak untuk berkumpul dan berserikat dapat diwujudkan dengan memasuki berbagai organisasi-politik dan non politik tanpa dihalangi oleh siapapun dan institusi manapun. Kebebasan pers dalam suatu masyarakat yang demokratis mempunyai makna bahwa masyarakat dunia pers dapat menyampaikan dunia informasi apa saja yang dipandang perlu, sepanjang tidak mempunyai elemen menghina, menghasut, ataupun mengadu domba sesama warga masyarakat.

Sudah lebih dari dua puluh tahun Indonesia telah memasuki masa transisi menuju demokrasi, masa di mana bergantinya sistem politik yang otoriter-sentralistik menjadi sistem politik demokrasi-desentralistik. Dua puluh tahun lebih Indonesia berupaya membangun sistem demokrasi atas dasar kepercayaan bahwa demokrasi merupakan pilihan terbaik dibandingkan dengan semua alternatif lainnya.

Menurut O'Donnell dan Schmitter (1986), peran elit dalam perubahan satu pola ke pola berikutnya tetap merupakan faktor yang sangat menentukan terwujudnya demokratisasi. Kenyataan ini tampak sesuai dengan apa yang menjadi simpulan para akademisi bahwa faktor yang sangat menonjol dalam menjelaskan transisi ke demokratisasi sejak 1970-an adalah perilaku dan sikap elit politik. O'Donnell dan Schmitter dalam penelitiannya telah mengemukakan argumen bahwa sikap para elit politik, perhitungan-perhitungan dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat umumnya menentukan apakah peluang dan kesempatan bagi demokrasi akan terjadi atau tidak (Mas'ood, 1994).

Dalam kaitan itu, Diamond, Linz, dan Lipset (1989), mengatakan bahwa suatu sistem pemerintahan yang demokratis harus memenuhi tiga syarat pokok: *Pertama*, persaingan yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk merebut posisi kekuasaan dalam pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif pada jangka waktu yang ditetapkan dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa. *Kedua*, partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam memilih pemimpin atau pembuatan kebijakan, paling tidak melalui pemilu yang diselenggarakan secara berkala dan adil sehingga tidak satupun kelompok sosial (warga negara dewasa) yang dikecualikan. *Ketiga*, tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan berkumpul ke dalam organisasi sebagai bentuk pelembagaan kompetisi dan partisipasi politik.

Melihat kondisi sekarang, mungkin banyak perbedaan pendapat terkait pertanyaan kesuksesan proses demokrasi di Indonesia. Dilihat dari aspek demokrasi prosedural, tentu saja terjadi banyak perubahan yang nyata terhadap aturan perundang-undangan yang memungkinkan diterapkannya sistem politik yang demokratis. Namun, secara substansi, proses demokrasi belum dapat diwujudkan, hal ini ditandai dengan makin maraknya kecurangan-kecurangan dalam setiap pemilu, banyaknya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat termasuk di dalamnya korupsi, serta masih banyak lagi berbagai hal yang selama ini tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita demokrasi.

Namun untuk lebih mudah menganalisa sistem politik demokrasi di Indonesia, indikator atau syarat di atas dapat dijadikan sebagai penilaian. *Pertama*, dari aspek akuntabilitas. Dari indikator ini, sejak pemerintahan pertama setelah 1998, pertanggungjawaban pemerintah (atas apa yang sedang dan telah dijalankan) kepada publik berjalan secara demokratis. Meskipun konstitusi di negara ini tidak mengatur bagaimana proses pertanggungjawaban itu dilakukan, namun hal itu terjadi dengan sosialisasi dan sikap transparansi pemerintah terhadap media terbuka secara luas. Kondisi ini dari waktu ke waktu selalu mengalami kemajuan. Media, baik massa maupun elektronik, menjadi mediasi yang paling signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah.

Kedua, dilihat dari rotasi kekuasaan, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang melakukan pergantian pemimpin secara demokratis. Indonesia telah mengadopsi sistem pemilihan langsung oleh rakyat, tidak hanya presiden tapi juga pemerintah di tingkat lokal. Konstitusi juga memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk menjadi calon pemimpin, hanya selama dua kali periode kepemimpinan di setiap jabatan yang diemban. Itu semua telah berhasil sejak tahun 1998.

Ketiga, indikator rekrutmen politik yang terbuka. Konstitusi memang belum memberikan peluang bagi calon independen untuk posisi presiden, namun itu tidak berarti bahwa rekrutmen politik yang terbuka tidak lah berjalan. Konstitusi telah memberikan dan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara untuk menjadi presiden meski harus tetap melalui partai politik. Hal ini sangatlah wajar, dikarenakan Indonesia masih dikatakan sangat muda dalam penerapan sistem politik demokrasi. Dalam kondisi yang seperti ini, partai politik diharapkan mampu menjalankan proses tersebut secara demokratis.

Keempat, pemilihan umum. Salah satu sistem politik demokrasi yang mengalami perkembangan yang sangat cepat sejak tahun 1998 adalah berkenaan dengan pemilihan umum. Indonesia telah menerapkan sistem pemilihan langsung oleh rakyat bagi eksekutif dan legislatif secara langsung, bebas, jujur, dan adil. Setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dalam praktiknya, pemilihan umum langsung tersebut dapat dikatakan cukup sukses bagi para pemula (seperti Indonesia). Sampai saat ini empat pemilu telah dilakukan dengan hasil yang baik, serta puluhan pemilihan kepala daerah yang secara sukses dilaksanakan.

Kelima, menikmati hak-hak dasar. Dilihat dari indikator ini, apa yang telah terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 juga dapat dikatakan mengalami

perkembangan yang luar biasa. Seperti misalnya hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak akan kebebasan pers, semuanya telah berjalan secara demokratis. Semua warga negara dapat menikmati semua hak tersebut. Mekanisme demokrasi yang menempatkan kekuatan masyarakat sebagai instrumen yang mempunyai otonomi untuk memperoleh jaminan atas hak-hak asasi manusia, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, memperoleh keadilan, serta pembagian sumber daya ekonomi yang merata.

Dari analisa di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan sederhana bahwa sistem politik demokrasi di Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu. Namun hal yang perlu diperhatikan ke depan adalah dalam rangka mewujudkan demokrasi yang substansi, di mana demokrasi tidak memberikan ruang bagi setiap penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaan, baik dalam proses merebut kekuasaan maupun dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Hal tersebut juga berbanding searah dengan pendidikan politik dan demokrasi terhadap rakyat, sehingga akan terjadi percepatan proses demokratisasi yang jauh lebih baik.

• **Demokrasi dan Keperluan akan Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu sarjana politik yakni Lucian W. Pye berpendapat bahwa demokrasi di negara-negara berkembang adalah barang mewah karena negara-negara itu harus mampu memberikan prioritas kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, orang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan cepat tercapai dengan seorang penguasa yang otoriter dengan sistem partai tunggal atau dominan, karena mereka menganggap bahwa dengan sistem seperti ini, negara-negara berkembang akan lebih menghemat dan lebih efisien dalam pembiayaan pemerintahan, dibanding dengan demokrasi yang membutuhkan banyak biaya. Hal seperti ini sangat tidak beralasan dan tidak ilmiah. Dalam masyarakat apapun juga, sistem politik dihadapkan pada berbagai macam tuntutan, begitu juga dengan sistem partai tunggal harus juga mengerahkan daya dan dana untuk menangani tuntutan tersebut.

Dewasa ini dalam banyak keadaan, pertumbuhan ekonomi yang cepat lebih mungkin digairahkan oleh berkurangnya praktek-praktek otoriter dan bertambahnya partisipasi rakyat dalam proses pembangunan bangsa. Harus diingat bahwa sejarah kebanyakan masyarakat terbelakang adalah sejarah pemerintahan otoriter. Namun yang perlu ditegaskan adalah kepemimpinan demokrasi harus mampu menggairahkan partisipasi masyarakat, dapat memobilisasi rasa ikut serta dalam usaha pembangunan ekonomi.

Salah satu sarjana politik yang berbicara dan membahas masalah konsep pembangunan politik adalah Lucian W. Pey dalam bukunya yang sangat terkenal yakni *Aspects of Political Development*. Dalam bukunya tersebut, Lucian W. Pye mengatakan bahwa konsep pembangunan politik mencakup beberapa hal atau aspek, antara lain :

- a. Pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi
- b. Pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industri
- c. Pembangunan politik sebagai modernisasi politik

- d. Pembangunan politik sebagai operasi Negara-Bangsa
- e. Pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum
- f. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa
- g. Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi
- h. Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur
- i. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan
- j. Pembangunan politik sebagai satu segi proses perubahan sosial yang multi-dimensional (MacAndrews, 1995 : 5 - 15).

Lebih jauh Lucian W. Pey mengemukakan bahwa dari berbagai pandangan atau tafsiran tentang pembangunan politik di atas, pada dasarnya adalah untuk mencari ciri-ciri pokok atau utama dari pembangunan politik itu sendiri. Ciri-ciri pokok tersebut adalah: *Pertama*, semangat dan sikap umum terhadap persamaan (*equality*). Maksud dari ciri ini adalah berkenaan dengan partisipasi massa dan keterlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik, jadi setiap warga negara harus menjadi warga negara yang aktif. Persamaan juga berarti bahwa hukum harus bersifat universal, dapat diterapkan pada semua orang, jadi semua warga harus sama di hadapan hukum. Terakhir persamaan juga berarti pemasukan ke dalam jabatan politik harus mencerminkan ukuran kecakapan berdasarkan prestasi dan bukan pertimbangan-pertimbangan status berdasarkan sistem sosial tradisional.

Ciri pokok *kedua* adalah kapasitas atau kesanggupan dari suatu sistem politik. Dalam arti tertentu, kapasitas berkaitan dengan *out-put* sistem politik, dan seberapa jauh sistem politik dapat memengaruhi sistem sosial dan sistem ekonomi. Kapasitas juga berarti efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijaksanaan umum. Sistem yang lebih maju dianggap tidak hanya dapat berbuat lebih banyak dari sistem yang belum maju, tetapi juga dapat bekerja lebih cepat dan teliti. Kapasitas juga dihubungkan dengan rasionalitas administrasi dan orientasi sekuler terhadap kebijaksanaan.

Ciri utama *ketiga* dari pembangunan politik adalah diferensiasi dan spesialisasi. Hal ini berlaku dalam menganalisa lembaga dan struktur. Jabatan-jabatan pemerintahan harus mempunyai fungsi dan wewenang masing-masing dan sifatnya terbatas, dan ada persamaan pembagian kerja dalam pemerintahan. Dengan diferensiasi timbul peningkatan spesialisasi fungsional dari berbagai peranan politik dalam sistem tersebut. Dan terakhir, diferensiasi juga menyangkut integrasi dari struktur-struktur dan proses-proses yang rumit. Artinya, diferensiasi bukanlah fragmentasi dan isolasi bagian-bagian yang berbeda dari sistem politik, tetapi spesialisasi yang didasarkan atas sesuatu pemahaman mengenai integrasi.

• **Masalah Pokok Mengenai Instabilitas dan Tertib Hukum**

Sejumlah masalah dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam hal instabilitas dan tertib hukum. Banyak yang menganggap bahwa demokrasi akan lebih memperkeruh dalam menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Sepintas memang kelihatannya pendapat itu benar, karena pokok semua proses akulturasi di dalam masyarakat transisi adalah pertentangan yang selalu terdapat antara kepercayaan akan tertib hukum dan keperluan akan perubahan yang terus menerus (Pennock, 1964 : 34). Tetapi dalam hubungan ini perlu diperhatikan, pertama-tama

adalah bahwa inti stabilitas politik adalah kemampuan mewujudkan perubahan-perubahan yang terarah, karena stabilitas juga mengandung arti kemampuan beradaptasi dalam menghadapi kondisi yang berubah.

Sebaliknya, instabilitas politik mengandung makna bahwa kebijakan politik terlalu kaku dan tidak luwes untuk disesuaikan dengan keseimbangan nilai yang selalu berubah dalam masyarakat atau terlalu goyah dan tidak mesti untuk dapat maju mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, stabilitas politik dapat dihubungkan dengan perubahan yang rasional diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan sosial sebanyak mungkin orang, sedangkan instabilitas dapat dihubungkan dengan perubahan yang tidak berhasil memuaskan keinginan sosial rakyat, dan menimbulkan rasa kecewa pada sebagian rakyat yang jumlahnya selalu berubah. Maka di sinilah peran demokrasi mampu menyelaraskan berbagai kemauan masyarakat sehingga dapat menimbulkan keseimbangan dalam masyarakat. Demokrasi juga menuntut adanya penegakan hukum seluruh warga negara atau masyarakat, maka dalam hal ini demokrasi tidak menimbulkan instabilitas dan justru sebaliknya akan menciptakan sebuah masyarakat yang stabil, seimbang, dan yang lebih penting akan selalu sadar terhadap peraturan atau hukum.

- **Masalah Artikulasi dan Agregasi Kepentingan**

Hal yang perlu diperhatikan dalam praktek demokrasi di negara berkembang adalah sifat dari politik sebagai proses, di mana kepentingan yang berlawanan satu sama lain dapat dibawa ke forum terbuka, dan kemudian dapat dibuat penyelesaian yang akan memperbesar kepentingan semua pihak. Untuk mencapai tujuan ini harus ada suatu proses terbuka, di mana kepentingan-kepentingan disampaikan (diartikulasikan) dan ditampung (diagregasikan) ke dalam kebijakan umum. Fungsi pokok politikus dalam sistem perwakilan adalah mengartikulasikan kepentingan tersebut.

Pembangunan yang disosialisasikan pemerintah tak seharusnya dimanifestasikan sebagai reduksionisme atas humanitas yang ditujukan untuk mendapatkan penghormatan. Pembangunan yang berorientasi kemanusiaan adalah pembangunan yang menjadikan kesejahteraan dan kebebasan aktualisasi diri sebagai variabel utama pembangunan. Menghindari peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengejar setinggi-tingginya penanaman modal asing sehingga tidak terjebak dalam euforia semangat itu. Namun, bermuara pada tergadainya inti kebangsaan melalui aliansi segitiga antara kelompok-kelompok feodal, birokrasi, dan kapitalisme berskala global.

Semangat pertumbuhan ekonomi yang tinggi terbukti belum mampu memenuhi kebutuhan utama masyarakat. Bahkan di tingkat tertentu, masyarakat bersedia untuk hidup dengan kesulitan di awal pembangunan. Asalkan hal yang sama juga dilakukan oleh elite-elite pemerintahan yang sewajarnya memberikan keteladanan politik. Tak masalah bagi rakyat untuk membangun perekonomian dari bawah, asal pemerataan dapat diterapkan.

Di samping itu, untuk menjawab terjadinya diskoneksi antara harapan tinggi publik dengan elite birokrasi pemerintahan, maka harus disodorkan semacam jaminan dari institusi negara untuk menjaga tatanan bagi partisipasi yang otonom

dari masyarakat. Negara harus terbuka kepada masyarakat dengan memberikan kewenangan yang lebih luas untuk terlibat dalam proses-proses. Penciptaan korporatisme negara dalam berbagai wujudnya hanya akan mengkreasikan kembali dehumanisasi dengan wajah-wajah yang menyeramkan.

SIMPULAN

Berakhirnya pemerintahan Presiden Suharto pada bulan 1998 menandai dimulainya era baru dalam sejarah politik di Indonesia. Fase baru yang dikenal dengan reformasi ini mulai tampil dengan demokrasi sebagai gagasan utamanya. Era ini dikenal juga sebagai fase awal dimulainya demokrasi yang terbuka dengan desentralisasi yang semakin diperluas. Namun di era reformasi sekarang ini, permasalahan-permasalahan demokrasi kembali muncul. Hal ini bisa dilihat di hampir setiap perhelatan politik, baik skala nasional maupun daerah. Artinya, meskipun keran demokrasi telah dibuka, namun secara substansi proses demokrasi belum dapat diwujudkan secara maksimal.

Dari analisa, dapatlah diambil suatu kesimpulan sederhana bahwa sistem politik demokrasi di Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu. Namun hal yang perlu diperhatikan ke depan adalah mewujudkan demokrasi yang substansi, di mana demokrasi tidak memberikan ruang bagi setiap penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaan, baik dalam proses merebut kekuasaan maupun dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Hal tersebut juga berbanding searah dengan pendidikan politik dan demokrasi terhadap rakyat, sehingga akan terjadi percepatan proses demokratisasi yang jauh lebih baik.

Indonesia harus segera mungkin menentukan orientasi pembangunan dengan dasar falsafah kemanusiaannya. Pembangunan yang menyingkirkan falsafah kemanusiaan, entah dengan perspektif modernisasi maupun dependensi, dapat dipastikan pembangunan itu akan berakhir dengan kegagalan. Dependensi menginspirasi keyakinan baru dalam masyarakat Dunia Ketiga, bahwa dalam mengejar ketertinggalan, mau tak mau, industri adalah keniscayaan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Di sisi lain, pembangunan politik dan ekonomi dalam riwayat panjang modernisasi akan sangat bermanfaat sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan kapitalisme di abad 18 yang kejam itu. Pada akhirnya, titik temu antara dependensi dan modernisasi dalam kemanusiaan adalah pembangunan yang indah.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. (1977). (ed) *Masalah Kenegaraan*, Cet. II, Jakarta: Gramedia.

Diamond, Larry, Juan J Linz, and Seymour Martin Lipset. (1989). (ed). *Democracy in Developing Countries : Latin America : Democracy in Developing Countries : Africa : Politics in Developing Countries : Comparing Experiences with Democracy*. Boulder, Colorado : Lynnee Reinner Publisher.

- Fukuyama, Francis. (1992). *The end of The Last Men*. New York : Free Press.
- Gaffar, Afan. (1999). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan Mei, Penerbit: Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel P. (1995). *Gelombang Demokratisasi Ketiga (terj. Asril Marjohan)*, Jakarta: LP3ES.
- Mas'oeid, Mohtar. (1994). *Negara, Kapital, dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy, J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- O'Donnell, Guillermo and Philippe Schmitter. (1986). *Transition from Authoritarian Rule. Tentative Conclusion about Uncertain Democracies*. California : Johns Hopkins University Press.
- Pey, Lucian W. (1966). *Aspects of Political Development*, Boston: Little, Brown and Company.
- Pennock, J Roland. (1964). (ed), *Self-Government in Modernizing Nations*, Prentice-Hall.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2006). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.